

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN DESA BIDANG PEMBANGUNAN DI DESA PULAU
BARU KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013**

REFLI ERLIANTO

Email : Reflierlianto@gmail.com

Pembimbing : Drs.H.Raja Muhammad Amin,MSi

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Success or failure of most organizations is determined by the quality leader entrusted with the task of leading organisasi.because that, in moving the indispensable participation of leadership and quality (quality leader).However, in fact in the village of Pulau Baru Kuantan District Hilir Regency Kuantan Singingi Opposite leadership The village head was found indications less acceptable to all the villagers are: (1) the high cost of obtaining a birth certificate that is not in accordance with Regulation Kuantan Singingi About Retribution Identity Card replacement fee and Deed civil registration. (2) Development conducted in the village of Pulau Baru through funding from the Village Fund Allocation (ADD) is less well targeted. (3) The head of the village are less able to embrace and accommodate the aspirations of the community so that leadership is less able to integrate the interests in the midst of society. (4) The head of the village are less able to establish cooperation with the Village Consultative Body as a partner in rural development.

The method used is qualitative data collection techniques with interviews, was conducted to determine the leadership of the village chief in the administration of the village administration, literature study, a method of data collection in order to obtain secondary data hold directly on the object under study.

Based on the results of the study authors, leadership village chief in the village of Pulau Baru Kuantan District Hilir Regency Kuantan Singingi Opposite is the village chief has not been able to embrace the public to be together in rural development. Various ways have been made head of the village community is not biased invite voluntarily engaged in rural development. And the constraints faced by the village chief in the lack of leadership is the approach taken in the village chief invited as well as to direct the development and the lack of communication with the village head of the village, and the lack of coordination with the village chief BPD as its partners in the development and accommodate the aspirations of the villagers.

Keywords: Leadership Village Head

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan proses pembangunan desa, di dalam prosesnya pembangunan desa terdiri dari dua unsur utama yaitu swadaya masyarakat dan pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintah agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimipinnya. Kepala Desa dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan desa dimana Kepala Desa yang merupakan pemimpin formal di desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan tugas urusan pembangunan menurut Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa. Pemimpin formal itu perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di desa. Agar program pemerintah efektif maka perlu adanya Kepemimpinan Kepala Desa dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal perencanaan pelaksanaan pembangunan desa.

Pentingnya Pembangunan Desa menurut pandangan Robert Chambers (dalam Untung Subagyo, 1992 : 38) memiliki beberapa urgensi, yaitu:

- a. Penduduk di negara dunia ketiga mayoritas berada di pedesaan,
- b. Penduduk yang berada di pedesaan banyak mengalami kemiskinan,
- c. Untuk mengurangi tekanan urbanisasi,

d. Sebagai usaha pemerintah dalam menghemat sekaligus menambah devisa negara.

Keberhasilan atau kegagalan peningkatan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kinerja Kepala Desa, yang sejauh mana Kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya dalam manajemen, berarti menjalankan kepemimpinan fungsi manajemen atau sebagai manajer dalam menjalankan fungsi manajemen.

Perkembangan pembangunan desa diberikan kebebasan dalam ketentuan yang mengaturnya untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang lebih baik. Salah satu aspek penting dalam Pembangunan Nasional yaitu upaya pembangunan pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bersifat menyeluruh yang keberhasilannya mutlak harus di dukung oleh semua masyarakat, untuk meningkatkan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai segala aspek kehidupan baik social, ekonomi, politik, dan kebudayaan, pemerintah perlu memikirkan program-program penguatan organisasi masyarakat di tingkat desa. Kepala Desa sangat berperan

dalam pembangunannya dan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan pemimpin dari organisasi formal yaitu elemen masyarakat yang terpilih. Pemimpin itu perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di desa masing-masing. Dijelaskan kewenangan Kepala Desa dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Desa serta Badan Permusyawaratan Desa adalah selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Kedua organisasi ini memerlukan kriteria memimpin supaya dapat membawa masyarakatnya kearah yang lebih baik dan berdasarkan tujuan sasaran yang diinginkan oleh pemerintah daerah yang berada ditingkat desa sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

Sukses atau tidaknya suatu fungsi yang dilakukan oleh pemimpin, salah satu faktornya ditentukan oleh bawahan atau pengikutnya. Apabila fungsi kepemimpinan dapat dilaksanakan dengan baik, sudah jelas berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dari bawahannya. Pelaksanaan tugas tergantung pada keinginan yang tulus dalam melaksanakan pekerjaan. Sesuatu pekerjaan akan berhasil dengan baik kalau pelaksanaan tugas pekerjaan dapat dilaksanakan dengan dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi. Untuk itu, meningkatkan hubungan kerja sama yang baik, perlu dilaksanakan suatu fungsi kepemimpinan diantaranya fungsi didalam mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi masyarakat (Karyadi, 2003 : 57).

Dari penjelasan diatas, penulis ingin mengkaji Kepemimpinan Kepala Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Pulau Baru merupakan sebuah Desa yang terletak Di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Desa Pulau Baru memiliki luas wilayah 10 Km² dengan jumlah penduduk 896 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 446 orang dan perempuan 450 orang. Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, masyarakat Desa Pulau Baru sangat membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana dan juga infrastruktur yang memadai dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Dibandingkan dari 14 Desa yang terdapat di Kecamatan

Kuantan Hilir Seberang, Desa Pulau Baru sangat jauh ketinggalan khususnya dibidang pembangunan seperti jalan, jembatan, sarana ibadah dan lainnya. Semua itu dikarenakan sikap tidak pedulinya Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa khususnya dalam pembangunan desa. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan social yang dirasakan oleh masyarakat.

Pada dasarnya biaya dalam pembangunan infrastruktur desa Pulau Baru adalah bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga bersumber dari program pemerintah yakni PNPM Mandiri untuk membantu membangun infrastruktur yang ada didesa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Memang dalam situasinya dalam Kepemimpinan Kepala Desa yang baru menjabat selama hampir 2 tahun ini tidak dapat merubah kondisi infrastruktur di Desa Pulau Baru, khususnya jalan Desa yang berada di tepi sungai batang kuantan (Indragiri) terancam hancur dan tidak dapat dilalui oleh warga Desa Pulau Baru. Adapun jalan yang ada di Desa Pulau Baru khususnya jalan desa memang tergolong sudah tua, pembangunan jalan desa dilakukan pada masa pemerintahan kepala Desa Maspar yang dibuat pada tahun 2000. Hal ini tentu sangat berbeda apabila dilihat dari infrastruktur yang ada Di Desa tetangga yakni Desa Pelukahan, dan juga Desa Tanjung Putus yang telah mempunyai infrastruktur jalan yang

sangat memadai dan hampir tidak ada jalan yang hancur.

Fenomena yang di dapati di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan yang dilakukan di Desa Pulau Baru melalui sumber dana Alokasi Dana Desa(ADD) tahun 2013 kurang tepat sasaran, hal ini disebabkan karena proses pembuatan jalan baru tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Seperti proses pembangunan jalan yang baru di Dusun III yang di ungkapkan oleh warga bahwa sesungguhnya lokasi yang akan dibuat jalan baru tidak sesuai dengan lokasi yang dipilih oleh kepala desa dalam pembangunannya.
2. Kepala Desa kurang dapat merangkul serta menampung aspirasi masyarakat sehingga kepemimpinannya kurang dapat mengintegrasikan kepentingan-kepentingan di tengah-tengah masyarakat. hal ini menyebabkan kepemimpinan yang dijalankan oleh Kepala Desa Pulau Baru sebatas naluri pribadinya saja tanpa melihat terlebih dahulu apa yang di butuhkan masyarakat.
3. Tingginya biaya pengurusan Akta Kelahiran yang berkisar Rp 150.000,-200.000; hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ,yang

tercantum dalam pasal 8 yaitu: Perda No 5 Tahun 2012 tentang penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil.

PELAYANAN CATATAN SIPIL

Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Pengesahan Anak	Biaya
a. Akta Pengakuan Anak	
1) Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000,-
2) Warga Negara Asing (WNA)	200.000,-
b. Pengesahan Anak	
1) Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000,-
2) Warga Negara Asing (WNA)	200.000,-
Pencatatan Perubahan Nama	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	100.000,-

Sumber : Perda No 5 Tahun 2012 tentang penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil.

Dari fenomena yang telah dijelaskan di atas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih

lanjut, yang mana mengambil topik :

“Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?
- b. Apa saja cara yang telah di tempuh Kepala Desa dalam mempengaruhi masyarakat dalam pembangunan Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?
- c. Apa saja faktor yang menjadi kendala Kepala Desa dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai Kepala Desa di Desa Pulau Baru kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Tinjauan Pustaka

1. Kepemimpinan

Mengutip pendapat Inu Kencana Syafii (2009 : 132) bahwa secara

etimologi kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Berasal dari kata dasar “pimpin” (dalam bahasa Inggris lead) bimbing atau tuntun, dengan begitu didalamnya ada dua pihak, yaitu yang di pimpin (umat) dan yang memimpin (imam).
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemimpin” (dalam bahasa Inggris leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
- c. Apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang mengepalai antara pemimpin dengan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis.
- d. Setelah Diawali dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (dalam bahasa Inggris leadership) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

2. Perbedaan Pemimpin Dan Pimpinan.

Harbani Pasolong (2008 : 3) menyatakan bahwa perbedaan pemimpin dengan pimpinan adalah

pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan pimpinan adalah orang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi atau birokrasi.

Mengutip pendapat Rukmana (dalam Harbani Pasolong, 2008:3) mengatakan bahwa pejabat sudah pasti pimpinan, tapi belum tentu dapat berperan sebagai pemimpin. Dari berbagai literature tentang kepemimpinan dapat dipahami bahwa pemimpin (leader) adalah orang yang menjalankan kepemimpinan (leadership). Sedangkan pimpinan adalah mencerminkan kedudukan seseorang atau sekelompok orang pada hierarki tertentu dalam suatu Birokrasi formal maupun informal. Pimpinan birokrasi tentu saja mempunyai bawahan, yang karena kedudukannya sebagai pimpinan yaitu mempunyai kekuasaan formal dan tanggung jawab.

3. Syarat dan Sifat Kepemimpinan

Menurut Hendry Fayol (dalam Sukarna, 1982 : 82) syarat-syarat yang dimiliki oleh pemimpin adalah :

- a. Sehat (Physical Quality).
- b. Cerdas (Mental Quality).
- c. Jujur dan adil (Moral Quality).
- d. Berpendidikan (Education Quality).
- e. Berpengalaman (Experience Quality).

Menurut Keith Devis (dalam Miftah Thoha, 1988 :36) empat sifat umum yang harus dimiliki seorang Pemimpin adalah :

- a. Kecerdasan.
- b. Kedewasaan dan keluasan hubungan social.
- c. Motivasi diri dan dorongan berprestasi.
- d. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan.

4. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan merupakan fungsi manajemen. Karena itu, Pemimpin suatu organisasi menjalankan fungsi manajemen dan sebagai salah satu profesi. Adapun fungsi Kepemimpinan menurut Dharma Setyawan Salam (2004 : 99-100) adalah :

- a. Memandu, menuntun dan membimbing pegawai melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Membangunkan motivasi kerja para pegawai sehingga para pegawai itu mencurahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Mengemudikan organisasi.
- d. Membangun jaringan komunikasi.
- e. Memberikan supervise/control yang efisien.
- f. Membawa pengikutnya mencapai sasaran sesuai jadwal waktu dan rencana yang telah ditentukan.

Fungsi Kepemimpinan dalam pembangunan menurut Kartini Kartono (1992 : 217) adalah

- a. Bisa memberikan dan mengembangkan motivasi untuk berkarya dan membangun. Jadi mampu menstimulasi segenap lapisan masyarakat maupun kaum muda untuk melakukan kekerjaan atau kerja di tengah era pembangunan.
- b. Mampu menggerakkan orang lain sehingga mau dan rela secara bersama-sama untuk mencapai tujuan untuk berkarya.
- c. Sanggup mempengaruhi dan meyakinkan orang lain sehingga menyadari urgensi pembangunan dan sanggup menerima usaha-usaha pembangunan sebagai milik bersama, kewajiban bersama dan tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan.
- d. Tulus dan ikhlas melaksanakan pembangunan sendiri melalui perbuatan nyata, contoh dan teladan secara nyata.

Menurut pendapat lain dari Kartini Kartono (2008 : 92) bahwa fungsi Kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervise/pengawasan yang efektif, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai ketentuan waktu dan perencanaan.

5. Desa.

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).

Menurut Taliziduhu Ndraha (2007) dalam bukunya “Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa” Desa adalah Kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan Pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan

pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan Desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana Pemerintahan Desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

7. Kepala Desa.

Kepala Desa adalah Pemimpin atau Kepala Pemerintahan dan sebagai pengemban kepercayaan masyarakat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan.

Menurut sumardjo dalam bukunya Pemerintahan Desa dan Kelurahan (1984:259) Kepala Desa adalah seseorang tokoh di Desa yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

Defenisi Konsepsional.

Konsep operasional ini di buat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini, maka dirasa perlu untuk memberikan batasan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kepemimpinan disini adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.
2. Kinerja Kepala Desa menjadi sasaran penelitian ini yakni dalam bentuk tupoksi Kepala Desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu menyangkut Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Metode Penelitian

- a. Lokasi Penelitian
- b. Informen Penelitian

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala desa	1 orang
2.	Sekretaris desa	1 orang
3.	Kepala urusan	4 orang
4.	Kepala dusun	3 orang
5.	BPD	2 orang
6.	Tokoh Masyarakat	2 orang
Jumlah		13 orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Baru.

- c. Jenis dan Sumber Data
- d. Teknik Pengumpulan Data
 - Wawancara
 - Study Kepustakaan
 - Teknik Analisis Data
 - Pengumpulan Data
 - Reduksi Data
 - Penyajian Data

- Penarikan Kesimpulan

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013.

A. Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa.

Kepala Desa selaku coordinator pembangunan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan di desanya mempunyai peranan yang krusial. Sebab dengan kepemimpinannya akan dirasakan sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan. Dalam pembangunan desa yang paling amat diperhatikan dan factor yang amat menentukan keberhasilan adalah bagaimana kepala desa dapat mengajak, mempengaruhi, membina dan memotivasi masyarakat desa tanpa partisipasi masyarakat tidak menyentuh sasaran pembangunan desa yang telah terprogram sebagai pembangunan nasional.

Untuk mengetahui bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa Pulau Baru, maka akan diuraikan berdasarkan hasil penelitian berikut ini :

1. Pemberian dan Pengembangan Motivasi yang diberikan Kepala Desa kepada Masyarakat untuk Berkarya terhadap pembangunan.

Usaha Kepala Desa Pulau Baru dalam memberikan kesempatan dan mengembangkan motivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dengan ajakan-ajakan persuasive dan komunikasi dengan kata-kata yang santun telah dilakukan oleh Kepala Desa. Namun dalam melaksanakannya kepala Desa belum dapat mengembangkan kreasi ide yang cemerlang sehingga masyarakat termotivasi terlibat langsung secara sukarela dalam pembangunan.

2. Mampu Menggerakkan Masyarakat untuk Mencapai Tujuan Pembangunan.
Kemampuan kepala desa Pulau Baru untuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas pembangunan secara sukarela amatlah perlu. Dengan usaha untuk merangkul masyarakat merasa memiliki peran arti demi keberlangsungannya.

Untuk itulah partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan dalam setiap kegiatan pembangunan maupun kemasyarakatan. Hal ini harus diupayakan oleh kepala desa agar setiap kegiatan yang dilaksanakan mendapat respon positif dari masyarakat. Kepala Desa sebagai pemimpin formal harus mengetahui hal ini secara luas, sebab sebagai kegiatan yang dilakukan di desa akan selalu membutuhkan keikutsertaan dan dukungan dari masyarakat agar apa-apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

3. Mempengaruhi dan Meyakinkan Masyarakat sehingga Menyadari Urgensi Pembangunan sebagai Usaha dan Milik serta Merasa Bertanggungjawab.

Kepala Desa agar program pembangunan di desanya dapat terlaksana harus dapat mensosialisasikan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk masyarakat, dimana juga meyakinkan masyarakat akan amat berharganya jikalau pembangunan disambut oleh masyarakat dengan partisipasi yang aktif. Dengan keterlibatan masyarakat ikut serta diupayakan terciptanya kepedulian masyarakat bahwa mereka juga memberikan andil bagi suksesnya pembangunan desa.

Kepala Desa disini menegaskan bahwa terkait tentang usaha untuk mempengaruhi dan meyakinkan masyarakat sudah dilakukannya, namun masih saja tetap masyarakat belum sepenuhnya menjalankan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa tersebut. Kepala Desa Masih perlu memikirkan cara atau pilihan lain bagaimana bisa agar masyarakat benar-benar mau mengikuti apa yang telah disampaikan.

4. Memberikan Ketauladanan Kepada Masyarakat secara Nyata.

Sebagai *orang timur* yang masih memandang kepada pemimpin, dimana pemimpin sebagai *public figure* yang sikap dan perbuatannya sangat diperhatikan serta mempengaruhi apa yang di ucapkan. Untuk itu

secara vertical pemimpin menjadi panutan bagi pengikutnya. Masyarakat amat menilai bagaimana Kepala Desa sebagai pemimpin dapat mencontohkan perbuatan yang terpuji.

B. Cara Yang Ditempuh Oleh Kepala Desa Dalam Mempengaruhi Masyarakat Desa.

Penyelenggaraan pembangunan di desa pada hakekatnya merupakan tugas dari kepala desa serta aparatnya bagaimana kepala desa dalam menggerakkan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pembangunan sebagai suatu istilah teknis, yang berarti membangkitkan masyarakat di Negara-negara berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Salah satu cara yang penting adalah bagaimana memaksimalkan pembangunan di desa Pulau Baru yaitu dengan bagaimana cara-cara yang telah ditempuh Kepala Desa dalam memotivasi serta penggerak warga desanya dengan melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di desa. Untuk mengetahui lebih jelasnya berikut cara-cara kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat desa yaitu :

1. Cara Kepala Desa Dalam Menetapkan Program Pembangunan.

Didalam proses perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data informasi yang akurat dan dipertanggungjawabkan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam ditempuh perencanaan pembangunan desa, perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

2. Cara Kepala Desa di dalam Memimpin Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Desa Yang Telah Ditetapkan.

Kepemimpinan Kepala Desa sangat jelas terlihat terhadap suksesnya pembangunan, karena merekalah ujung tombak dalam pembangunan di desa bisa tercapai. Sistem nilai yang ada dalam masyarakat, perilaku masyarakat, tradisi masyarakat, dan keyakinan mereka bahwa pembangunan tersebut akan membawa dampak terjadinya perubahan dalam lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, pelaksanaan pembangunan Desa akan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta akan tumbuh swadaya dan kemandirian masyarakat dengan mengembangkan swadaya masyarakat sehingga akan menimbulkan keserasian yang dinamis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama.

3. Cara Kepala Desa Dalam Mempengaruhi, Menggerakkan, Dan Mengarahkan Partisipasi

Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Keaktifan warga masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan bersama dipengaruhi oleh kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Sedangkan Kepala Desa adalah pemimpin atau Kepala Pemerintahan dan sebagai pengemban kepercayaan masyarakat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

C. Kendala Kepala Desa Dalam Menjalankan Kepemimpinannya.

Pembangunan desa agar berhasil sangat ditentukan oleh komponen yang terkait erat di dalamnya. Hal yang sama dalam pembangunan desa berhasil ialah bagaimana kepala desa selaku pimpinan formal di desa dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan keaktifan masyarakat dalam pembangunan, maka upaya kepala desa untuk membangun desa mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini dapat menumbuhkembangkan perasaan masyarakat bahwa pembangunan sebagai upaya bersama, milik bersama dan tanggungjawab bersama.

Di desa Pulau Baru akibat kemampuan kepala desa yang kurang dalam kepemimpinannya

kepada masyarakat dalam pembangunan agar dapat berpartisipasi dalam proses pemabangunan. Akibatnya masyarakat desa Pulau Baru kurang memberikan respon terhadap proses pembangunan. Lebih lanjut factor kendala yang mempengaruhi hal ini adalah:

1. Kepala Desa kurang Komunikasi dengan Perangkat Desa dan Kurang Koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Kelemahan kepala desa dalam merangkul komponen masyarakat.
3. Kelemahan menghimpun pendapat masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi dapat ditarik kesimpulan berikut ini :

1. Kepemimpinan Kepala Desa Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi disimpulkan kurang mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dalam pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan wawancara dengan informan bahwa kurang mampunya Kepala Desa dalam memberikan dan mengembangkan motivasi kepada

masyarakat untuk berkarya dalam pembangunan, kurang dapat menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan, kurang dapat mempengaruhi dan meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan sebagai usaha milik bersama serta kurang dapat memberikan ketauladanan dengan baik.

2. Cara dan perilaku kepala desa dalam menetapkan program pembanguna, dalam memimpin pelaksanaan dalam pembangunan, dalam mempengaruhi menggerakkan dan mengarahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kurang baik, hal ini dikarenakan masih lemahnya kepala desa dalam merangkul elemen-elemen masyarakat di semua dusun serta kurang komunikasinya kepala desa dengan perangkat-perangkatnya, dan kurang Koordinasinya Kepala Desa dengan BPD sebagai badan yang menampung aspirasi masyarakat.
3. Factor kendala kepala desa dalam melaksanakan kepemimpinannya adalah kurangnya komunikasi kepala desa dengan perangkat desa,lemahnya kepala desa dalam merangkul elemen masyarakat, dan lemahnya artikulasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah desa.

B. Saran

Dari hasil penelitian saran yang dapat diajukan dalam penelitian tentang kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa pulau baru kecamatan kuantan hilir seberang

kabupaten kuantan singing adalah :

1. Kepala Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat lebih mneningkatkan melakukan komunikasi dengan masyarakat sehingga dapat merangkul komponen masyarakat.
2. Dalam upaya meningkatkan koordinasi dengan perangkat desa, Kepala Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi harus bisa meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi dengan perangkat desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai mitra kerja pemerintah desa atau Kepala Desa dapat lebih melakukan fungsinya sebagai menampung aspirasi masyarakat yang nantinya di sampaikan kepada pemerintah desa. Disamping itu juga perlunya meningkatkan pengawasan kepada pemerintah desa agar dapat menjadi dorongan bagi Kepala Desa untuk lebih melibatkan komponen masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Dalam upaya mengefektifkan komunikasi dengan masyarakat Kepala Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi dapat memanfaatkan momentum sholat jum'at dan wirid di mushola atau masjid untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Kartono, Kartini, 1998, *“Pemimpin dan Kepemimpinan”*, Rajawali, Jakarta.
- , 2008, *“Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?”*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kencana, Inu, Syafiie, 2009, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)* Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan Keempat.
- Marbun, B. N., 1989, *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*, Erlangga, Jakarta.
- Poltak, Lijan, Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Impementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama.
- Sukarna, 1992, *Administrasi/Management (Suatu Pengantar Study)*, Bijaksana Amanah, Bandung.
- Subagyo, Untung, 2002, *LKMD dan Peranannya dalam Mendukung Kemandirian Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setyawan, Darma, Salam, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia* Djambanan, Jakarta.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- Thoha, Miftah, 1998, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Rajawali, Jakarta..
- Taliziduhu Ndraha, 2007, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Widjaja, 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta